

Penggunaan Metode Diskusi Kelompok Kecil Tentang Kontribusi Etnis Tionghoa Pada Masa Pergerakan Nasional Untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik

Roykhan Khibbiy Yasir

Universitas Negeri Semarang

Email: roykhankhibbiy@students.unnes.ac.id

Abstract

This article aims to (1) determine the position of the Chinese ethnic group during the reign of the Dutch East Indies, (2) discuss the contribution of the Chinese ethnic group in fighting for Indonesian independence during the national movement period, and (3) determine the relationship between the contribution of the Chinese ethnic group during the national movement period and the growth of attitudes student tolerance. This article was conducted using a qualitative method with a literature study approach. The research results from this article show that the Chinese ethnicity, which has always been seen as an ethnic group that has close ties to the Dutch, has a low sense of Indonesian nationalism, and prioritizes their own interests, has made a major contribution in fighting for Indonesian independence. Where the educational reforms carried out by the Chinese elite gave birth to educated people who were then involved in various fields, both journalistic and political, to fight for the fate of the people and for Indonesian independence during the period of the national movement. Through the small group discussion method, history teachers can discuss the contribution of the Chinese ethnicity during the national movement to foster students' tolerance. As for the implementation of history learning using the small discussion group method, the history teacher should carry out several activities including preliminary, core and closing activities. Also, the history teacher conducts an evaluation to find out the tolerance attitude of students.

Keywords: *Chinese Ethnicity, National Movement, Small Group Discussion, Tolerance*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui kedudukan etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, (2) membahas kontribusi etnis Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan nasional, serta (3) mengetahui kaitan kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional dengan tumbuhnya sikap toleransi peserta didik. Artikel ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Adapun hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa yang selama ini selalu dipandang sebagai etnis yang memiliki kedekatan dengan Belanda, rasa nasionalisme keIndonesiaan yang rendah, serta lebih mengutamakan kepentingan sendiri ternyata memiliki kontribusi yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di mana reformasi pendidikan yang dilakukan oleh elite Tionghoa melahirkan orang-orang yang terdidik yang kemudian terjun dalam berbagai bidang baik jurnalistik maupun politik untuk memperjuangkan nasib rakyat dan kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan nasional. Melalui metode diskusi kelompok kecil, guru sejarah dapat membahas tentang kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional untuk menumbuhkan sikap toleransi peserta didik. Adapun dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah yang menggunakan *metode small discussion group*, guru sejarah hendaknya melakukan beberapa kegiatan mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Tak lupa pula, guru sejarah mengadakan evaluasi untuk mengetahui sikap toleransi peserta didik.

Kata kunci: *Etnis Tionghoa, Pergerakan Nasional, Diskusi Kecil, Toleransi.*

Copyright © 2024, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang multikultural, di mana

masyarakatnya memiliki keanekaragaman yang dapat dikatakan sangat kompleks baik dari segi etnis, suku, maupun budaya. Etnis di Indonesia berjumlah 300 lebih dengan keberagaman suku bangsa hingga 1300 lebih. Keberagaman sendiri menjadi hal yang wajar bila disadari dan dihayati keberadaannya sebagai hal yang harus disikapi dengan saling menghargai atau toleransi (Lestari, 2015).

Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia yang keberadaannya selama berabad-abad menjadi bagian dari bangsa ini. Akan tetapi keberadaan Tionghoa hingga saat ini selalu dipandang sebagai etnis yang memiliki rasa nasionalisme rendah, serta lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Hal tersebut selain disebabkan karena kebijakan stratifikasi penduduk oleh pemerintah Kolonial Belanda yang membekas, juga didorong adanya sikap diskriminatif yang ditunjukkan oleh pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967, yang isinya melarang segala hal yang berhubungan dengan Tiongkok baik tradisi maupun adat-istiadat tanpa seizin pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah Orde Baru menganggap etnisitas dan kesukuan sebagai suatu hal yang menghambat pembangunan (Soedjatmiko dalam Pitoyo dan Triwahyudi, 2017).

Sejarah terkait etnis Tionghoa sendiri dalam konteks sejarah nasional yang diajarkan di sekolah hanya memiliki porsi kecil bahkan jarang dibahas. Hal tersebut patut disayangkan, mengingat keberadaan etnis Tionghoa dapat ditemui secara mudah di setiap kota di Indonesia. Bahkan apabila kita melihat sejarahnya, etnis Tionghoa memiliki kontribusi yang besar bagi kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan nasional. Dimana dari kontribusi tersebut jika dicermati secara seksama dan lebih dalam mengandung nilai-nilai toleransi yang dapat ditanamkan kepada peserta didik. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bernegara.

Untuk itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan rumusan masalah yang akan dibahas, yakni yang pertama mengenai bagaimana kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional? selain itu bagaimana metode pembelajaran apa yang sesuai terkait kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional untuk menumbuhkan sikap toleransi peserta didik? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah metode pembelajaran yang sesuai guna menumbuhkan sikap toleransi peserta didik yakni salah satunya menggunakan metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran sejarah. Dengan adanya tulisan ini, maka peserta didik akan menyadari kenyataan bahwa terdapat kontribusi besar etnis Tionghoa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bermuara pada penanaman sikap menghargai nilai-nilai multikultural dan mengembangkan sikap toleransi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode studi literatur sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penulisan (Zeed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan. Pertama, penulis mencari sumber melalui pendekatan pustaka yang didapatkan dari sumber rujukan Google Scholar. Kedua, kemudian selanjutnya penulis melakukan analisis terkait sumber referensi yang relevan dengan topik dalam penelitian. Ketiga, penulis melakukan interpretasi gagasan penulisan sesuai dengan topik dalam penelitian, berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau kuantitatif,

prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Penggolongan Penduduk Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Secara garis besar, orang asing yang datang ke Hindia Belanda terdiri atas orang Arab, Eropa, India, Melayu, serta Tionghoa. Di sisi lain, ada juga penduduk pribumi yang menjadi penduduk dengan jumlah terbanyak. Untuk mengendalikan penduduk yang beragam tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan penggolongan atau stratifikasi penduduk. Penggolongan tersebut tentu saja membawa dampak pada kedudukan sosial setiap golongan masyarakat, seperti dalam mendapatkan lapangan pekerjaan maupun hak untuk memperoleh pendidikan. Adapun penggolongan penduduk yang terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda adalah:

a) Penduduk Eropa

Pada mulanya orang Eropa yang bertempat tinggal di Hindia Belanda bekerja sebagai militer maupun pegawai sipil, seperti akuntan, asisten pegawai, saudagar, juru tulis, dan sebagainya. Bahkan sebagaimana yang dikutip dalam Tineke Hellwig, Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda (2007) menyatakan bahwa ada juga orang Eropa yang bekerja sebagai pendeta dan sukarelawan keagamaan. Kebanyakan Orang Eropa melakukan ikatan perkawinan dengan penduduk pribumi. Sehingga hasil dari perkawinan campur tersebut menghasilkan keturunan yang dikenal dengan sebutan Indo. Penduduk Eropa di Hindia Belanda juga terbagi lagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

1) Orang Indo

Salah satu kelompok dari penduduk Eropa ini merupakan hasil perkawinan antara orang Eropa dengan orang pribumi. Mayoritas orang Eropa yang bertempat tinggal di Hindia Belanda adalah orang Indo. Kelompok ini juga tergolong istimewa, di mana mereka memiliki status kewarganegaraan ganda yakni Eropa dan Pribumi. Dengan demikian, jika anak dari kelompok Indo ini lahir dari hasil perkawinan yang diakui secara resmi, maka akan menjadi orang Eropa, sementara bila tidak diakui maka menjadi orang Pribumi (Stevent, 2004). Meskipun anak Indo telah diakui secara resmi sebagai orang Eropa, tetapi tetap saja kedudukan mereka di mata pemerintah Hindia Belanda tidak dapat disetarakan oleh orang Eropa asli.

2) Para Penetap (*Blijvers*)

Kelompok ini merupakan orang Eropa yang sudah lama bertempat tinggal di Hindia Belanda bahkan sampai memiliki beberapa keturunan. Meskipun mereka sudah lama bertempat tinggal di Hindia Belanda, mereka tidak melakukan perkawinan dengan Pribumi sehingga keturunan yang dihasilkan merupakan orang Eropa asli.

3) Para Perantau

Kelompok selanjutnya yang tergolong penduduk Eropa di Hindia Belanda adalah kaum perantau. Di mana mereka merupakan sekumpulan orang yang lahir di Eropa, yang kemudian datang ke Hindia Belanda untuk keperluan kerja, dan jika masa kerjanya sudah habis, maka mereka akan kembali lagi ke

Eropa.

Berselangnya waktu, jumlah penduduk Eropa di Hindia Belanda menjadi semakin banyak, sehingga kedudukan mereka menjadi semakin penting. Hal tersebut terjadi karena Terusan Suez yang ada berada di sebelah barat Semenanjung Sinai secara resmi dibuka pada tahun 1869, yang membuat jarak tempuh dari Eropa ke Hindia Belanda menjadi lebih singkat dari biasanya.

b) Pendudukan Timur Asing

Istilah Timur Asing merupakan sebutan untuk orang-orang Asia yang bertempat tinggal di Hindia Belanda. Di antaranya seperti orang Arab, Tionghoa, India, dan Melayu. Di mana sebagian besar masyarakat Timur Asing yang ada di Hindia Belanda adalah Tionghoa. Etnis Tionghoa sendiri terbagi menjadi dua golongan, yakni Peranakan dan Totok. Etnis yang tergolong Peranakan adalah mereka yang berasal dari hasil pernikahan campuran dengan penduduk pribumi (Irianto, 2006). Sementara Totok merupakan orang Tionghoa yang memiliki garis keturunan Tiongkok murni Suryadinata (1986) menambahkan bahwa kaum peranakan telah berakulturasi dengan pribumi, sementara Totok memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok (Lisminingsih, 2012).

Pada mulanya penduduk Tionghoa tinggal di Hindia Belanda hanya sementara. Namun setelah melihat potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Hindia Belanda, dalam beberapa literatur sejarah banyak orang Tiongkok yang berdatangan dan bertempat tinggal di Hindia Belanda untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dan layak dengan tujuan utamanya untuk berdagang. Kedatangan mereka pun diterima baik oleh pribumi, bahkan ada yang sampai menikah dengan pribumi. Sehingga keinginan untuk bertempat tinggal di sini dalam waktu lama pun muncul.

Memasuki tahun 1900-an, mayoritas Tionghoa yang bertempat tinggal di Hindia Belanda adalah keturunan penduduk Tiongkok yang selama berabad-abad bertempat tinggal di Hindia Belanda. Meskipun demikian, mereka masih melihat Tiongkok sebagai negara dan sumber kebudayaan mereka. Kebanyakan penduduk Tionghoa yang ada di Hindia Belanda secara kelompok tinggal di daerah yang bernama Petionghoan. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi peranan Tionghoa dalam masyarakat. Di mana mereka tidak diperkenankan untuk bekerja sebagai pegawai negeri, polisi, tentara, dan sebagainya. Adapun bidang pekerjaan yang dapat diambil oleh penduduk Tionghoa di Hindia Belanda adalah yang ada kaitannya dengan ekonomi dan perdagangan. Dalam kelas sosial di Hindia Belanda, penduduk Tionghoa berada satu tingkat di atas penduduk Pribumi. Walaupun begitu, jika ada pendudukan Tionghoa yang melanggar hukum yang diterapkan oleh pemerintah maka akan diadili di pengadilan untuk penduduk Pribumi, bahkan penduduk Tionghoa merasa bahwa mereka lebih baik dalam hal apapun dari penduduk Pribumi, oleh karena itu menginginkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dengan penduduk Eropa.

Untuk lebih membatasi gerak etnis Tionghoa, pemerintah Hindia Belanda melalui *Wijerstelsel* membangun sebuah pusat pemukiman khusus untuk etnis Tionghoa yang disebut sebagai Pecinan (Darimi, 2008). Selain itu ada juga *passentelesel* (pas jalan) yang mewajibkan etnis Tionghoa meminta izin dulu bila ingin bepergian. Dengan adanya kebijakan ini membuat penduduk Tionghoa terisolasi dan membentuk golongan sendiri

lengkap dengan kehidupan yang tradisional. Selain digunakan untuk orang Tionghoa, istilah Timur Asing juga ditunjukkan kepada orang Arang yang bertempat tinggal di Hindia Belanda. Di mana pada awalnya tujuan mereka datang ke Hindia Belanda untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama.

c) Penduduk Pribumi

Masyarakat Pribumi yang ada di Hindia Belanda dapat digolongkan menjadi tiga kelas yang didasarkan atas status sosialnya, di antaranya:

1) Pribumi Bangsawan

Golongan ini merupakan pribumi yang menjadi raja dan keturunannya yang kemudian menjadi penguasa tinggi pemerintahan.

2) Pribumi Elite atau Priyayi

Istilah Priyayi berasal dari kata "yayi" yang memiliki arti adik. Maksudnya adalah adik dari serang raja. Dengan demikian pribumi yang berada di golongan ini termasuk saudara dari pribumi bangsawan, meskipun secara silsilah jauh. Pada awal abad ke-20 muncul priyayi baru, di mana mereka yang awalnya rakyat jelata yang kemudian menjadi pegawai pemerintahan. Sejak saat itu, priyayi terbagi menjadi dua yakni priyayi tinggi dan rendah. Priyayi tinggi yang merupakan keturunan ningrat, dan priyayi rendah yang menjadi pegawai karena pendidikan.

3) Golongan Pribumi Rakyat Biasa

Dalam strata sosial, golongan ini berada di status sosial yang paling rendah. Mereka adalah pribumi yang tidak memiliki darah keturunan ningrat dan bukan merupakan pegawai pemerintah. Kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh, pedagang, kuli, dan sebagainya.

Kontribusi Etnis Tionghoa Pada Masa Pergerakan Nasional

Kontribusi Etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional dimulai dengan berdirinya organisasi *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK). Pendirian tersebut karena ada penggolongan penduduk dan perlakuan yang diskriminatif oleh pemerintah Hindia Belanda telah membangkitkan kesadaran nasional di kalangan etnis Tionghoa. Gerakan nasionalisme tersebut menuntut kesetaraan hak dan kewajiban penduduk Tionghoa dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Pada awal pelaksanaan organisasi yang lahir di Batavia ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi Tionghoa di Hindia Belanda sekaligus pusat wadah persatuan dan pergerakan penduduk Tionghoa. Hal tersebut senada dengan pertanyaan Iskandar Yusuf (2013) bahwa THHK didirikan untuk menggalang persatuan Tiongkok Peranakan dan Totok. Meskipun demikian, masih ada yang belum mengetahui makna penting persatuan dan kesatuan, akan tetapi THHK dapat dikatakan sebagai poros organisasi pergerakan etnis ini. Semangat dari masyarakat begitu besar terhadap kehadiran organisasi THKK. Hal tersebut terlihat bahwa dalam waktu singkat terdapat banyak cabang di berbagai daerah. Lima tahun kemudian organisasi ini merambah pada bidang pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah THHK sebanyak 75 dengan total 5.500 siswa (Nabila, 2021). Hal yang mendasari pendirian sekolah ini adalah ide para pendiri THHK untuk memanfaatkan sarana pendidikan sebagai alat untuk memaksa pemerintah Hindia Belanda agar memperhatikan pendidikan etnis Tionghoa yang terkesan terabaikan.

Dalam pelaksanaannya, sekolah THHK menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan bahasa Belanda. Meskipun pada awalnya bahasa Belanda diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran bahasa asing, namun karena terkendala biaya untuk mendatangkan guru bahasa Belanda, maka mereka memutuskan untuk memilih bahasa Inggris. Di samping biaya untuk mendatangkan guru bahasa Inggris Tionghoa dari Singapura lebih murah, juga sangat berguna karena menjadi bahasa perdagangan kawasan Asia Timur (Prasetyo dan Wartoyo, 2015).

Keputusan untuk menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris ini yang telah memicu tanggapan sebagian penduduk Tionghoa bahwa THHK telah bertolak belakang dengan tujuan awalnya yang ingin melestarikan kebudayaan Tiongkok. Selain itu, sekolah THHK yang bersifat modern juga dianggap tidak sesuai dengan sistem pendidikan klasik yang diimplementasikan oleh Kekaisaran China. Meskipun begitu, keberadaan sekolah THHK menjadi awal mula sekolah Tionghoa yang berbasis modern di Hindia Belanda. Sehingga banyak penduduk Tionghoa yang menaruh harapan tinggi terhadap sekolah ini. Banyaknya anak Tionghoa yang bersekolah di sini berdampak pada diberhentikannya berbagai sekolah Tiongkok yang lama. Seperti sekolah Tionghoa Gie Ook yang berdiri sebelum abad ke-20 pada tahun 1904, karena sistem pendidikannya yang dianggap tidak relevan lagi.

Sikap THHK yang berani tampil beda telah menjadi inspirasi bagi penduduk Tionghoa yang berada di Hindia Belanda untuk turut serta memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajibannya seperti halnya penduduk pribumi. Kebijakan yang diambil oleh THHK tidak terlepas dari pengaruh politik yang diterapkan di Tiongkok. Di mana saat itu, Kaisar Dinasti Qing memberikan bantuan baik berupa dana ataupun lainnya. Bukan hanya itu, Sun Yat Sen yang memimpin kelompok revolusioner China juga ikut membantu keberadaan THHK. Bahkan para simpatisan Sun Yat Sen rela datang ke Hindia Belanda dengan menjadi guru di sekolah-sekolah THHK. Adanya bantuan dan dukungan dari dua kelompok politik Tiongkok yang berbeda dan berlawanan ini menunjukkan bahwa keberadaan etnis Tionghoa yang ada di Hindia Belanda masih dianggap sebagai bagian dari rakyat Tiongkok yang harus disejahterakan kehidupannya.

Hubungan yang dekat antara THHK dengan Tiongkok juga ditunjukkan ketika kaisar Tiongkok mengirim inspektur sekolah untuk meninjau secara langsung sekolah-sekolah THHK. Di mana pada November 1907 ada dua penjelajah yang bernama Hay Yong dan Hay Kie yang ditugaskan untuk mengantar tiga utusan Kaisar Tionghoa yang merupakan pemimpin *Departement van Landbouw* Tiongkok yakni Kim Tjhe, Yo Soe Kie, serta Tay Sien ke Hindia Belanda. Kedatangan ketiga utusan Kaisar Tiongkok ini selain untuk meninjau sekolah-sekolah THHK, melainkan juga mendirikan lembaga pendidikan yang bernama *Khaj Lam Tay Hak* di daerah Nanking, Tiongkok. Tujuannya adalah untuk membantu sekaligus memudahkan anak-anak Tionghoa yang ada di Jawa agar dapat melanjutkan sekolah di Tiongkok. Kedekatan ini lah yang menjadi tanda tanya bagi pemerintah Hindia Belanda. Mulai dari sini kesetiaan etnis Tionghoa terhadap pemerintah Hindia patut dipertanyakan.

Menurut Ongkhan (dalam Hapsari, 2016) menyatakan bahwa pergerakan yang dilaksanakan oleh THHK selama periode ini merupakan gerakan terbatas hanya sebatas untuk kepentingan golongan mereka sendiri. Meskipun mereka tidak senang terhadap sikap kolonialisme pemerintah Hindia Belanda yang dianggap diskriminatif serta kurang memperhatikan kesejahteraan penduduk Tionghoa, akan tetapi nyatanya pergerakan yang

dilakukan oleh THHK pada periode ini belum mengarah kepada perjuangan kemerdekaan.

Meskipun begitu sekolah yang dibentuk oleh THHK ini telah berhasil melahirkan penduduk Tionghoa yang terdidik. Kondisi terdidik ini akan mendorong nasionalisme (Anthony, 2002). Pendidikan yang telah mereka capai telah mendewasakan perspektif politik kedua golongan yang berbeda tersebut. Di mana para elit pribumi sejak awal selalu menyuarakan anti kolonial dan ingin memerdekakan diri dari pemerintahan Hindia Belanda. Berbeda dengan penduduk Tionghoa yang masih terombang-ambing menentukan arah dan tujuan politiknya. Namun pada tahun 1920-an, secara perlahan para tokoh Tionghoa berani untuk mengajukan diri berkonsolidasi bersama para elit pribumi untuk mewujudkan kemerdekaan yang sudah lama diinginkan.

Eksistensi etnis Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan mulai merambah ke dunia pers. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada masa pergerakan nasional, bidang jurnalis menjadi suatu kegiatan yang eksklusif. Di mana hanya orang terdidik saja yang dapat bergabung ke bidang ini. Keberadaan pers yang menjadi sarana pendukung dalam pergerakan nasional di Hindia Belanda ini dilandaskan atas dasar adanya kesadaran identitas kaum Tionghoa terdidik yang muncul sebagai reaksi terhadap politik *apartheid* yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda (Asmadi, 2015). Dalam pelaksanaannya, pers memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyebarkan gagasan-gagasan. Di sisi lain, pers Tionghoa terus berkembang pesat dengan menyuarakan identitas mereka meskipun keberadaannya terusik oleh kebijakan pembredelan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dalam usaha menyebarkan gagasan, pers Tionghoa juga memiliki hubungan dengan kesadaran nasionalisme pribumi. Hubungan tersebut nampak pada fungsi utama dari pers itu sendiri, yakni sebagai media untuk komunikasi publik. Di mana pers Tionghoa mampu memberikan informasi dan opini-opini yang jelas dari berbagai tokoh yang berpengaruh sehingga gagasan-gagasan mereka dapat tersebar luas serta dapat dijadikan pegangan bagi penduduk Pribumi untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, segala hal yang dirasakan oleh etnis Tionghoa tertulis dalam surat kabar dan terbitan lainnya yang secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran kaum Pribumi akan identitas bangsanya.

Adanya dukungan pendanaan yang luar biasa dari para pengusaha Tionghoa yang ada Indonesia menjadikan pers milik penduduk Tionghoa mampu menampilkan penerbitan yang kualitasnya tidak jauh beda bila dibandingkan dengan pers milik orang Barat. Bahkan Pers milik Tionghoa misalnya *Sin Po* memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain yakni banyak surat kabar yang mereka terbitkan menggunakan bahasa Melayu, sehingga muatan beritanya dapat dibaca oleh orang Pribumi. Kontribusi etnis Tionghoa semakin nampak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa yang diselenggarakan di Jakarta ini dianggap sebagai alat pemersatu bagi seluruh etnis bangsa untuk menjadi bagian dari Indonesia. Hal yang menarik adalah tempat yang digunakan untuk pembacaan Sumpah Pemuda adalah rumah penginapan orang Tionghoa yang bernama *Sie Kok Liong*. Selain itu terdapat juga beberapa tokoh Tionghoa seperti Ong Kay Sing, Liauw Kwee, Tijo Djin Kwie, serta Thiam Hong yang terlibat aktif dalam peristiwa sumpah Pemuda.

Sementara itu surat kabar Tionghoa yang didirikan oleh Yoe Sin Gie, yakni *Sin Po*, di mana pada awalnya berhaluan nasionalis Tiongkok menjadi surat kabar pertama yang menyiarkan

lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman lengkap dengan not angka dan not-blok pada November 1928, serta mempopulerkan dan menyebarluaskan pergantian nama Hindia Belanda dengan Indonesia. Langkah ini patut diapresiasi, mengingat pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda sedang gencar memburu dan menangkap tokoh elit yang bersikap nonkooperatif.

Sejak adanya peristiwa Sumpah Pemuda, perasaan saling menghormati dan menghargai mulai muncul dari masing-masing pihak. Hal tersebut dibuktikan dalam terbitan surat kabar *Sin po* yang menyebut kata pribumi diganti dengan sebutan bumiputera. Sementara sebutan China terhadap etnis minoritas ini diganti dengan Tionghoa. Kemudian sikap ini ditiru dan diikuti oleh semua surat kabar yang ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satunya Matahari. Di mana surat kabar yang ada di Semarang ini dengan berani menyatakan akan membela tanah air Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa mulai ada perubahan arah politik di kalangan etnis Tionghoa.

Meskipun begitu etnis Tionghoa masih memiliki tantangan besar dalam mewujudkan persatuan sesama bangsanya. Hal tersebut tampak pada pendirian-pendirian partai politik yang memiliki prinsip bertolak belakang satu sama lain. Di mana masih ada sebagian penduduk Tionghoa yang menyatakan dirinya sebagai anggota *Chung Hwa Club* seperti H. H. Hakan dan Khouw Kim An dengan lantang tidak menyuarakan kesetiaannya pada Indonesia sebagai identitas akan tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak karena tidak didukung oleh organisasi dan partai politik tertentu. Oleh karena itu mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka *Chung Hwa Club* menyelenggarakan kongres yang pertama. Dalam penyelenggaranya kongres ini didukung secara penuh oleh kaum Tionghoa peranakan yang berpendidikan Belanda dan para pengusaha Tionghoa. Kongres ini diselenggarakan di Semarang, dengan dihadiri sebanyak 300 orang peserta. Adapun peserta kongres didominasi oleh kaum Tionghoa terdidik. Hasil dari diselenggarakannya kongres ini adalah keputusan bersama untuk mendirikan sebuah organisasi politik. Satu tahun, tepatnya bulan April 1928, diadakanlah kongres kedua *Chung Hwa Club* di lokasi yang sama. Di mana dalam kongres ini *Chung Hwa Club* secara resmi mendirikan *Chung Hwa Hi*, yakni sebuah wadah untuk menghimpun etnis Tionghoa, yang selanjutnya disebut sebagai CHH, dan diketuai oleh H, H Kan.

Adapun Tujuan dari didirikannya CHH dapat kita lihat dalam anggaran dasarnya, bahwa PTI dengan tegas menyatakan akan aktif memperjuangkan tercapainya kemerdekaan Indonesia (Setiono, 2008). Dalam pelaksanaannya, organisasi CHH memperoleh dukungan dari kalangan intelektual peranakan untuk mendorong penduduk Tionghoa menerima kekawulaan Belanda dan terlibat secara aktif dalam lembaga-lembaga politik lokal dalam *Volksraad*. Selain itu CHH juga lebih mendukung keberadaan pendidikan Belanda daripada pendidikan Tionghoa karena mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan cara yang dianggap baik untuk berhasil dalam lingkup masyarakat lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan keberpihakan CHH kepada pemerintah Hindia Belanda adalah digunakannya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam setiap rapat yang diselenggarakan. Langkah ini mereka lakukan atas dasar keraguan apakah suatu saat nanti akan lahir sebuah negara baru yang merdeka. Sehingga mereka memandang bahwa penduduk Tionghoa harus tetap setia kepada pemerintah Hindia Belanda, karena dianggap akan memberikan sebuah perlindungan kepada mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa CHH merupakan bentuk tumbuh kembangnya pandangan politik baru

yang condong berkiblat kepada pemerintah Hindia Belanda.

Di antara pemimpin CHH yang paling berpengaruh adalah HH Kan dan Phoa Liong Gie. Pandangan mereka tentang kedudukan etnis Tionghoa peranakan yang ada di Hindia Belanda perlu diperhatikan. Kan berpandangan bahwa kepentingan etnis Tionghoa peranakan akan terjamin baik di bawah pemerintah Hindia Belanda, bahkan dalam setiap orientasi politiknya ia menjadi seseorang yang sangat mendukung pemerintah Hindia Belanda. Bahkan sampai pada tahun 1941, Kan masih mendukung segala langkah politik yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, pemimpin lainnya yakni Phoa Liong Gie yang merupakan pengacara muda yang menjadi anggota Badan Pimpinan pusat CHH, mengutarakan pendapat yang sedikit berbeda. Ia beranggapan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mendesak etnis minoritas seperti Tionghoa peranakan ini untuk mendukung salah satu pihak dalam pertentangan antara pemerintah Hindia Belanda dengan penduduk pribumi. Phoa menambahkan bahwa penduduk tetap melayani pihak yang sedang berkuasa di Hindia Belanda, baik itu Belanda maupun pribumi. Pandangan Liong Gie kemudian membuat CHH dianggap sebagai partai yang oportunis oleh kaum pribumi yang nasionalis (Aji, 2010).

Di sisi lain, terdapat juga tokoh elit Tionghoa yakni Liem Koen Hian yang menyatakan dirinya sebagai rakyat Indonesia sehingga sudah menjadi kewajiban untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Liem Koen Hian menyampaikan pemikirannya bahwa Indonesia merupakan tanah air dan negaranya etnis Tionghoa. Sehingga penduduk Tionghoa menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan harus ikut serta membantu Indonesia dalam membentuk sebuah pemerintahan sendiri yang merdeka melalui cita-cita konstitusional. Bahkan seperti yang dikatakan Leo Suryadinata (2005) bahwa Liem Koen Hian tidak setuju dengan pandangan awal dari kelompok *Sin Po* yang menganjurkan nasionalisme Tiongkok dan sekaligus menolak pandangan CHH yang setia kepada pemerintah Hindia Belanda (Kurniawan, 2014). Pemikiran Liem Koen Hian tersebut hasil pengamatan keadaan di sekitarnya (Andayani, 2017). Untuk menguatkan pemikiran tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Liem Koen Hian kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

Keberadaan PTI sebagai sebuah partai politik Tionghoa peranakan yang berorientasi pada Indonesia memang tepat pada waktunya. Pada awalnya, kemunculan PTI dalam kancah pergerakan nasional dimulai oleh sebuah peristiwa pemboikotan pemberitaan sepakbola oleh para jurnalis "kulit berwarna" di Surabaya. Saat itu seorang jurnalis yang berkebangsaan Belanda, yakni Beker yang juga merupakan salah satu pemimpin *Nederlandsch Indische Voetbal Bond* (NVIB) atau pada saat ini PSSI, melarang jurnalis untuk datang dan memberitakan jalannya pertandingan. Alasan pelarangan tersebut bukan begitu saja diterapkan, melainkan ada hal yang mendasarinya, yakni karena jurnalis kulit berwarna pada saat itu sering menjelek-jelekkan kebijakan NVIB. Liem Koen Hian yang pada saat itu menjabat sebagai redaksi pers *Sin Tit Po* tersulut emosi, sehingga menyarankan agar para jurnalis melakukan pemboikotan pemberitaan dan tidak lagi menonton pertandingan bola yang diadakan oleh NVIB. Tidak butuh waktu lama, Liem Koen Hian ditangkap oleh *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID), akan tetapi segera dibebaskan karena adanya protes dari para pemimpin nasionalis pribumi di *Volksraad*.

Sebagai partai yang berhaluan nasionalis Indonesia membuat PTI memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk ikut berjuang kemerdekaan Indonesia dari tangan Hindia Belanda. Bahkan Liem Koen Hian yang merupakan ketua partai Tionghoa Indonesia menyatakan ingin meninggalkan kewarganegaraan Tionghoknya dan menjadi warga negara Indonesia begitu

merdeka.

Kontribusi nyata PTI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ketika ada salah satu anggota PTI yakni Ko Kwat Tiong berhasil merebut satu kursi di Volksraad pada periode tahun 1935 hingga 1939. Hal tersebut patut diapresiasi, karena pada saat itu sangat sulit bagi orang non Eropa untuk duduk di kursi pemerintahan. Dengan bergabungnya Ko Kwat Tiong dalam pemerintahan, maka akan lebih mudah bagi dirinya untuk bekerja sama dengan tokoh elit pribumi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan ketika ia bersama elit pribumi menandatangani Petisi Soetardjo. Adapun isi dari petisi tersebut ialah agar *Volksraad* menyelenggarakan sebuah konferensi para wakil Belanda dan Bumiputera, di mana anggotanya memiliki hak yang sama, dengan tujuan menyusun suatu rencana agar Hindia Belanda memperoleh hak otonominya sendiri sesuai batas-batas yang tercantum pada pasal 1 *grondwet* (Marihandono dkk, 2016)

Kontribusi PTI untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pun berlanjut, yakni ketika PTI mendukung lahirnya partai Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) pada 18 Mei 1937. Di mana salah satu anggota PTI yang bernama Oei Gee Hwat juga ikut menjadi pengurus. Dengan masuknya etnis Tionghoa ke dalam partai yang mayoritas anggotanya pribumi dapat dimaknai dalam tiga hal. Pertama, bahwa penduduk Pribumi sendiri telah menerima keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia. Kedua, pada tahun 1930-an, adanya perubahan arah politik etnis Tionghoa yang mulai condong pada Indonesia. Yang terakhir, kekuasaan politik pemerintah Hindia Belanda sedang dalam kondisi buruk, sehingga politik etnis yang dipopulerkan mulai memudar.

Selang beberapa lama kemudian, tepatnya setelah terjadinya pergantian tambuk kekuasaan, di mana Jepang berkuasa di Indonesia, kontribusi etnis Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia justru semakin meluas. Artinya tidak hanya sebatas pada ranah partai politik. Hal tersebut terbukti tatkala Liem Koen Hian dan tiga wakil Tionghoa lainnya yakni Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei dan Tan Eng Hoa diikutsertakan sebagai salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari Hapsari (2016) terdapat juga penduduk Tionghoa yang bernama Jap Tjawan ikut terlibat dalam merumuskan UUD 1945 yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Metode Diskusi Kelompok Kecil Dalam Pembelajaran Sejarah

Dalam rangka menumbuhkan sikap toleransi pada diri peserta didik melalui materi kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional, maka seorang guru sejarah harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah diskusi kelompok kecil. Adapun pengertian dari metode diskusi kelompok kecil seperti yang dikutip dalam Rahmawati (2022) merupakan rangkaian aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam suatu kelas secara berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat tercapai, di mana setiap anggota kelompok diberikan suatu masalah topik diskusi untuk dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama. Sementara dalam pengertian lain diskusi kelompok kecil adalah sebuah diskusi kelompok kecil dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan dalam hal pemecahan masalah yang memiliki keterkaitan dengan materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Sulistyowati, 2016).

Seperti halnya metode kelompok belajar lainnya, menurut diskusi kelompok juga memiliki unsur-unsur yang termuat di dalamnya dan terkait satu sama lain, antara lain:

1. Adanya Ketergantungan yang bersifat Positif

Dalam pembelajaran yang menggunakan metode diskusi kelompok kecil menghendaki peserta didik untuk saling bergantung dalam artian positif, seperti saling bekerja sama dan memberikan motivasi. Dengan demikian akan tercipta interaksi yang positif di antara anggota kelompok.

2. Akuntabilitas Individual

Hal yang menarik dari metode diskusi kelompok kecil adalah mengharuskan adanya unsur akuntabilitas individual sebagai tolak ukur sejauh mana penguasaan bahan ajar setiap anggota kelompok dan diberi *feedback* tentang capaian prestasi belajar anggota kelompok, sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta saling mengetahui anggota mana yang memerlukan bantuan. Berbeda dengan diskusi kelompok yang masih konvensional, unsur ini sering tidak diperhatikan sehingga tugas-tugas hanya dikerjakan oleh sebagian anggota kelompok.

3. Interaksi Secara Tatap Muka

Diskusi kelompok kecil mengharuskan setiap anggota kelompok belajar untuk saling berinteraksi dan berdiskusi secara tatap muka. Adanya interaksi semacam ini memungkinkan setiap anggota kelompok menjadi sumber belajar bagi sesamanya.

4. Terdapat Keterampilan Sosial

Salah satu unsur dalam diskusi kelompok kecil ini menghendaki setiap anggota kelompok memiliki berbagai keterampilan sosial, seperti sikap toleransi atau tenggang rasa, sopan dan santun kepada sama, kritis terhadap suatu ide, berani mempertahankan ide yang logis, mandiri, tidak mencoba untuk mendominasi anggota kelompok yang lain, dan berbagai sikap yang lain yang tentunya bermanfaat dalam menjalin hubungan antar anggota sehingga bukan hanya diasumsikan tetapi secara sadar diajarkan.

5. Adanya Proses Kelompok

Proses kelompok dalam diskusi kelompok kecil terjadi ketika setiap anggota kelompok mengadakan evaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Di mana setiap anggota kelompok hendaknya membahas tentang perilaku anggota baik yang kooperatif maupun tidak kooperatif serta membuat sebuah keputusan terkait perilaku mana yang harus diperbaiki dan diperhatikan.

Dengan menerapkan metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran sejarah, maka akan dapat diambil beberapa manfaat, antara lain:

- a. Peserta didik dapat mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalaminya;
- b. Peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab akan tugas yang dibebankan kepada dirinya;
- c. Peserta didik dapat belajar sesuai minat dan kemampuan sendiri, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan dirinya;
- d. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai;
- e. Membantu peserta didik untuk dapat memahami dan berfikir secara kritis terkait materi permasalahan yang diberikan oleh guru sejarah;
- f. Proses pembelajaran menjadi hidup.

Pelaksanaan Metode Diskusi Kelompok Kecil Dalam Pembelajaran Sejarah

Metode diskusi kelompok kecil sendiri dapat diterapkan dalam berbagai pembelajaran termasuk pembelajaran sejarah. Di sisi lain, dalam kenyataan pembelajaran sejarah selama ini lebih cenderung bersifat monoton dengan terpaku pada metode ceramah dari guru yang dinilai kurang baik dalam segi penyampaian sehingga dinilai membosankan bagi peserta didik. Terlebih lagi dengan peserta didik saat ini yang karakteristiknya jauh berbeda dengan yang dahulu. Oleh karena itu, pada pembelajaran sejarah ini dapat diterapkan dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil, karena dinilai baik bukan hanya untuk menyampaikan materi secara jelas, melainkan juga untuk melatih keterampilan berinteraksi dan keberanian dari peserta didik dalam hal penyampaian pendapat, serta menumbuhkan kepribadian sosial siswa, seperti sikap toleransi, demokrasi, dan saling menghargai satu sama lain.

Pada tulisan ini sendiri, materi yang digunakan tentang “Kontribusi Etnis Tionghoa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Sementara media yang digunakan dalam pembelajaran, seperti LCD Proyektor dan tayangan slide Power Point. Kemudian untuk sumber belajar yang digunakan, seperti buku paket sejarah, modul belajar praktis, buku sejarah lain yang relevan, serta internet. Tujuan dari pembelajaran ini yakni melalui penerapan metode diskusi kelompok kecil peserta didik mampu mengetahui kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional dan nilai-nilai yang terkandung yang kemudian diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.

Penggunaan metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran sejarah pasti membutuhkan langkah-langkah atau tahapan yang sesuai dan tepat. Terdapat beberapa kegiatan dalam pelaksanaan model ini yang dapat diterapkan pada materi dalam pembelajaran sejarah guna menumbuhkan sikap toleransi peserta didik, antara lain:

a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam tahap pendahuluan, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan antara lain:

1. Membuka pelajaran

Guru sejarah membuka pembelajaran dengan beberapa langkah, seperti mengucapkan salam kepada peserta didik, meminta siswa untuk berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas, serta mengecek kehadiran peserta didik.

2. Apresiasi

Guru sejarah menyampaikan hubungan materi “Kontribusi Etnis Tionghoa Pada Masa Pergerakan Nasional” dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya kepada peserta didik kemudian mengajukan pertanyaan pemantik tentang materi yang akan dipelajari, sementara peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.

3. Penyampaian Motivasi

Dalam tahap ini, guru sejarah memberikan motivasi kepada peserta didik tentang “Kontribusi etnis Tionghoa Pada Masa Pergerakan Nasional”. Sementara peserta didik mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru.

4. Penyampaian Tujuan Pembelajaran

Guru sejarah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang bagaimana kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional dan nilai apa saja yang dapat dipelajari dari materi tersebut.

b. Kegiatan Inti

1. Pemberian Stimulus

Dimulai dengan kegiatan membentuk kelompok belajar dalam skala kecil, di mana masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 orang, dan setiap kelompok memilih ketua kelompok dan notulen. Kemudian peserta didik mengamati tayangan gambar tentang kontribusi etnis tionghoa pada masa pergerakan nasional yang tersedia di powerpoint.

2. Identifikasi Masalah

Setiap kelompok diberi satu permasalahan yang akan dipecahkan terkait dengan materi yang diberikan sesuai dengan LKS dan buku paket tentang pergerakan nasional. Adapun permasalahan yang dibahas antara lain:

a) Kelompok 1

Materi: Bagaimana kedudukan etnis Tionghoa dalam strata sosial pada masa Hindia Belanda

b) Kelompok 2

Materi: Latar belakang munculnya kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional

c) Kelompok 3

Materi: Kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional

d) Kelompok 4

Materi: Arti penting mempelajari kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional.

a. Pengumpulan Data

Guru mengarahkan setiap kelompok untuk berdiskusi dan meminta mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya baik dari buku paket, modul belajar praktis, maupun internet yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Selain itu juga, guru mendorong peserta didik untuk menjunjung sikap toleransi dengan menghargai pendapat setiap anggota kelompok. Dalam tahap ini guru mengamati dan sikap toleransi setiap peserta didik.

b. Pengembangan dan Penyajian Karya

Guru meminta perwakilan dari setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang kontribusi etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan terhadap yang apa yang disampaikan, begitu seterusnya. Selain itu juga guru membatasi waktu presentasi agar semua kelompok dapat bagian secara merata.

3. Kegiatan Penutup

Berdasarkan hasil diskusi, kemudian guru memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan setiap kelompok dan meluruskan ketidaksepahaman dalam diskusi. Selain itu guru juga memberi penguatan dan apresiasi kepada setiap kelompok atas hasil kerjanya.

Untuk langkah selanjutnya, guru dapat melakukan evaluasi guna mengetahui sikap toleransi peserta didik setelah proses pembelajaran secara berkelompok selesai. Langkah pertama, setelah guru mengamati dan mencatat sikap toleransi peserta didik saat pelaksanaan diskusi di lembar observasi. Kemudian, hasil lembar observasi tersebut dibahas dan dilaporkan

dalam bentuk instrument penilaian sikap toleransi. Dengan adanya penilaian instrumen penilaian sikap toleransi peserta didik akan memudahkan guru dalam menilai sikap sesuai dengan kegiatan belajar yang dilaksanakan.

Kesimpulan

Adanya pembagian golongan penduduk dan perlakuan yang diskriminatif oleh pemerintah Hindia Belanda telah membangkitkan kesadaran nasional di kalangan etnis Tionghoa ditandai dengan berdirinya organisasi *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK). Meskipun begitu, nyatanya semangat persatuan dan kesepakatan mengenai arah nasionalisme Tionghoa dalam organisasi sulit terwujud. Hal tersebut karena kuatnya ikatan budaya antara penduduk Tionghoa dengan negara Tiongkok.

Pada dasarnya, pendidikan diadakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pentransferan ilmu dari guru ke peserta didik. Namun sayangnya, sistem pendidikan tidak pernah terlepas dari politik. Seperti sekolah-sekolah yang dimiliki Tionghoa pada masa pemerintah Hindia Belanda, di mana dijadikan sebagai sarana untuk membentuk sebuah identitas dan sikap nasionalisme etnis Tionghoa. Meskipun begitu adanya pendidikan telah melahirkan orang-orang yang terdidik, mereka mulai berani menyuarakan pemikirannya, salah satunya melalui jurnalistik. Tidak mengherankan bahwa saat itu surat kabar menjadi hal yang penting dalam penentuan arah nasionalisme etnis Tionghoa.

Selain bidang jurnalistik, kontribusi etnis Tionghoa merambah ke dunia politik ditandai dengan berdirinya Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dengan tekad untuk memperjuangkan nasib penduduk dan kemerdekaan Indonesia bersama dengan perkumpulan nasionalis lainnya. Dengan bekerja sama nya etnis Tionghoa dengan Pribumi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjadikan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Referensi

- Agustinus, Michael. (2012). *Dari Nasionalisme Cina Hingga Indonesierschap: Pemikiran Liem Koen Hian Tentang Kedudukan Orang Tionghoa Di Indonesia (1919-1951)*. Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia.
- Aji, R. N. B. (2010). *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola, 1915-1942*. Ombak.
- Andayani, S. A. S. (2017). Pemikiran Indonesierschap Liem Koen Hian (1929-1951). *Risalah*, 4(1)
- Anthony D. Smith (2002). *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Asmadi, S. H. J. (2015). Peranan Pers Tionghoa Peranakan Di Surabaya Dalam Pergerakan Nasional 1902-1942.
- BSI, S. L. A. (2012). Analisis kehidupan masyarakat Tionghoa suku Totok dan Tionghoa peranakan pada abad 17 di Batavia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 3(2)
- Darini, R. NASIONALISME ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA.
- Djoko Marihandono, D. Y. (2016). *Soetardjo Kartohad Ikoesoemo*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.

- Hapsari, R. D. (2018). Bibit Nasionalisme di Kalangan Penduduk Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(2).
- Hellwig, T. (2007). *Citra kaum perempuan di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jusuf, I., Naga, D. S., & Kwartanada, D. (2013). *Dari Tiong Hoa Hwe Koan 1900 sampai Sekolah Terpadu Pahoa 2008. (No Title)*.
- Kurniawan, H. (2014). Peran Etnis Tionghoa Pada Masa Pergerakan Nasional: Kajian Pengembangan Materi Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Penelitian*, 18(1).
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Nabila, A. P. (2021). Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) Sebagai Representasi Pendidikan Modern Etnis Tionghoa di Batavia tahun 1901-1942. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 12(2).
- Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. (2017). Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara. *Populasi*, 25(1), 64-81.
- Prasetyo, Y. (2015). Sejarah Komunitas Tionghoa Di Yogyakarta 1900-1942. *Jurnal Edukasi: Kajian Ilmu Pendidikan*, 1(1), 21-30.
- RAHMAWATI, C. (2022). *Penerapan Strategi Pembelajaran Small Group Discussion Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa Pada Tema Peristiwa Dalam Kehidupan Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial Di Kelas V Sdit Insan Cendekia Bangkinang Kota* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. TransMedia.
- Sulistyowati, N. W. (2017). *Implementasi small group discussion dan collaborative learning untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi ikip pgri madiun. Assets: jurnal akuntansi dan pendidikan*, 5(2), 173-190.
- Th. Stevens, Mason (2004). *Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.